

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 17 dan 19

Pendapatan Parkir Bocor

■ Target Rp 4 Miliar Realisasi Rp 2,5 Miliar

BALAIKOTA- Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir masih tinggi dimana di tahun 2017, dari target Rp 4 miliar hanya tercapai Rp2,5 miliar saja.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi kepada *Wawasan* di Balai-kota, Senin (21/5). Menurutnya, retribusi parkir umum sebenarnya merupakan pos primadona untuk meningkatkan PAD Kota Semarang.

"Realisasinya masih terjadi kebocoran yang besar. Parkir umum yang sangat berpotensi itu justru tidak mencapai target penerimaan untuk PAD," terangnya.

Supriyadi mengusulkan agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memberlakukan sistem parkir berlangganan. Dengan sistem tersebut maka nantinya akan memutuskan mata rantai penerimaan retribusi parkir mulai dari juru parkir, pemilik area parkir, petugas penarik retribusi baru.

Dengan sistem parkir berlangganan nantinya diterapkan bagi pemilik kendaraan asli Kota Semarang. Setiap warga Semarang yang memiliki kendaraan cukup membayar sekali saja biaya parkir dalam setahun berbarengan dengan pembayaran pajak kendaraan.

"Kalau begitu kan warga tidak perlu repot harus bayar parkir terus menerus setiap parkir. Ini hanya untuk parkir umum, harus dibedakan dengan parkir khusus. Targetnya

bakan bisa Rp20 miliar," tambahnya.

Sedikitnya 1 juta unit sepeda motor dan 500.000 unit mobil dimiliki warga kota ini. Dalam satu hari, jika satu sepeda motor ditarik retribusi Rp 1.000 untuk sekali parkir maka sudah ada penerimaan Rp 1 miliar, sedangkan retribusi untuk mobil Rp 2.000, maka sudah ada penerimaan Rp 1 miliar. "Itu baru satu hari, kalau satu bulan tinggal dikalikan 30 hari. Hasilnya sangat besar," urainya.

■ Parkir

Kepala Dishub Kota Semarang M Khadik menuturkan, sektor parkir umum memang memiliki potensi pendapatan daerah yang luar biasa. Saat ini, Dishub sedang dalam upaya merumuskan upaya yang paling tepat dalam hal pengaturan parkir tersebut.

Ia berharap segera mendapatkan konsep pengaturan parkir dan sistem penarikan retribusi parkir, sehingga masalah kebocoran retribusi parkir bisa ditekan. Jika demikian, maka penerimaan PAD parkir umum bisa lebih tinggi lagi.

"Ini kami masih mencari format pengaturan parkir yang pas. Yang jelas di 2018 ini target

Bersambung ke hlm 19 kol 1)

Pendapatan

(Sambungan hlm 17)

pendapatan parkir jadi Rp 15 miliar, naik dibanding 2017 lalu yang hanya sekitar Rp 4 miliar," paparnya.

Kenaikan target pendapatan retribusi tersebut dirasa sangat berat karena berkaca pada 2017 lalu saja dengan target Rp 4 miliar tidak tercapai. Apalagi, 2018 ini pendapatan naik hampir 400 persen.

"Memang berat, tentu dibutuhkan langkah inovasi yang nanti betul-betul mencakup seluruh fungsi parkir. Tidak semata-mata untuk pendapatan daerah tapi juga bagaimana menata dan mengatur agar semuanya dapat. Lalulintas lancar, parkirnya teratur, dan memberikan kontribusi untuk daerah," jelasnya.

Khadik mengungkapkan, pengaturan parkir umum sangat penting dilakukan karena kemacetan lalu lintas di Kota Se-

marang juga disebabkan adanya parkir yang tidak berizin atau parkir liar. Pihaknya akan meninjau kembali beberapa lokasi parkir umum yang berada di tepi jalan yang justru memicu terjadinya kemacetan.

"Kita sudah inventarisasi dan dalam waktu dekat kita rencana akan melakukan penertiban terhadap parkir liar. Dan juga akan tertibkan izin-izin lama yang masih berlaku. Yang ternyata setelah melihat perkembangan Kota Semarang ini, parkir menjadi salah satu penyebab kemacetan," katanya.

Saat ditanya mengenai sistem parkir berlangganan, Khadik mengatakan, saat ini dalam proses pengkajian. Tidak menutup kemungkinan nantinya sistem tersebut akan diberlakukan jika dirasa lebih efektif dalam mengatur dan menarik retribusi untuk pendapatan daerah. ■ *Hid-Ks*